

**MEKANISME KOLABORATIF PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN INDRAMAYU**



Oleh:

Fitriana Maghdalena, S.Sos

NIM: 22200012021

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar *Master of Arts* (M.A.)

Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi Pekerjaan Sosial

YOGYAKARTA

2025

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1009/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : Mekanisme Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Indramayu

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRIANA MAGHDALENA, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 22200012021
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68a504d32fe79

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ramadhanita Mustika Sari
SIGNED



Valid ID: 68a86b7a667df

Penguji II

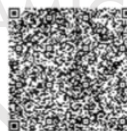
Ro'fah, MA., Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 68a81a5bad3df

Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 68abefe86e2a

Yogyakarta, 19 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriana Maghdalena
NIM : 22200012021
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 11 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Fitriana Maghdalena
NIM: 22200012021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fitriana Maghdalena

NIM : 22200012021

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Fitriana Maghdalena
NIM 22200012021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **MEKANISME KOLABORATIF PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN INDRAMAYU**

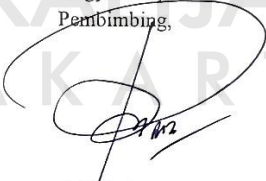
Yang ditulis oleh:

Nama : Fitriana Maghdalena
NIM : 22200012021
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A.)

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Juli 2025
Pembimbing,


Ro'fah, M.S.W., M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

ABSTRAK

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang menghadapi tantangan kompleks dalam perlindungan anak, khususnya terkait kasus kekerasan seksual. Fenomena meningkatnya jumlah kasus, termasuk yang melibatkan anak-anak sebagai korban, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, hingga fenomena migrasi orang tua sebagai TKI/TKW yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap anak. Peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 18 tahun 2012 menyatakan bahwa sistem penanganan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan yang berkompeten. Kondisi tersebut mendorong pentingnya sistem penanganan yang bersifat kolaboratif antar pemangku kepentingan untuk mencegah dan merespons kekerasan seksual terhadap anak secara efektif. Penelitian ini berupaya menjawab tiga persoalan utama, yakni bagaimana mekanisme kolaborasi antar pemangku kepentingan terbentuk, apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kolaborasi tersebut, serta bagaimana implikasinya terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini berasal dari empat lembaga, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Polres Indramayu, Dinas Sosial, dan Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga dilakukan melalui mekanisme koordinasi lintas sektor, MoU dan Perjanjian tidak tertulis, serta rujukan antar lembaga. Namun, terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas kolaborasi, antara lain tidak adanya forum atau koordinasi tetap dan belum adanya SOP lintas sektor yang terintegrasi. Di samping tantangan tersebut terdapat potensi yang menjadi pondasi berjalannya kolaborasi tersebut yaitu kepercayaan antar sektor yang cukup kuat dan kesadaran akan keterbatasan sumber daya yang menyebabkan lembaga selalu terhubung dalam lingkaran penanganan. Implikasi dari penelitian ini terlihat dari peningkatan kesadaran masyarakat dimana isu tentang kekerasan seksual sudah banyak di perhatikan tidak lagi dianggap tabu, masyarakat menjadi lebih waspada dalam terhadap perlindungan anak, meningkatnya kesadaran yang dilihat dari banyaknya kasus yang dilaporkan serta terbentuknya layanan yang lebih responsif kepada masyarakat.

Kata kunci: kolaborasi, pemangku kepentingan, kekerasan seksual pada anak.

MOTTO

Ya Allah Ya Allah Ya Allah

Ya udah si

Gas!



PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada:

1. Almamater, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Pekerjaan Sosial
2. Seluruh akademisi dan Praktisi Pekerja Sosial khususnya pada Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)



KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Mekanisme Kolaboratif Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Indramayu” dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurahkan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan Cahaya kepada manusia. terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Prof. Dr. Moch. Nur. Ichwan, S.Ag., M.A. selaku direktur pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
3. Najib Kailani, S.Fil.I., MA, Ph.D, selaku ketua program studi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga
4. Dr. Moh. Mufid, selaku dosen penasihat (DPA)
5. Ro’fah, M.S.W., M.A., Ph.D selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, memberikan sumbangan pikiran, arahan serta motivasi kepada penulis untuk menyusun dan penyelesaian tesis ini dengan baik
6. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Dr. Ramadhanita Mustika Sari, S.Th.i., M.Hum. selaku dosen penguji
7. Kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Indramayu, Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Indramayu yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memberikan data sesuai dengan yang penulis butuhkan.
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Hilmi Agus Tantowi, S.E, dan Ibu Inayati, A.Md. yang telah memberikan do’a, dukungan, motivasi, dan uang dana sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
9. Kedua adikku tersayang Mutiyah Nabila dan Aulia Izzatunnisa yang selalu menjadi penyemangat dan penguat sehingga penulis bisa sampai titik ini.
10. Rekan-rekan konsentrasi pekerja sosial Asyfa, Lulu, Mella, Laras, Adhienda, Zahro, Yuniasari, Dian, Nining, Haris, Irsyad, Faqih dan Sahrul yang sangat hebat dan menginspirasi.
11. Rekan-reka jauh yang selalu mendukung penulis, Luthfiyah, Ratu, Sindrita, dan yang lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
12. Laptop Asus Putih ku yang huruf A nya sudah hilang dan motor beat pop ku terimakasih selalu kebersamaan penulis selama penulis mengenyam pendidikan dari sarjana hingga magister.

13. Yanyang ikan cupang kesayanganku terimakasih karena sudah menemani penulis di kamar kos yang sunyi dan sepi itu.
14. Untuk diriku sendiri Fitriana Maghdalena terimakasih karena kamu sudah sampai di titik ini kamu sangat hebat dan laur biasa! Terimakasih untuk selalu bertahan, berbenah dan tidak tumbang dalam keadaan apapun walaupun kamu kamu bisa menyerah pada seribu alasan yang ada, tolong cintai dirimu lebih besar dan lebih banyak lagi, kamu berharga dan layak untuk semua kebahagiaan, cinta dan pencapaian baik sekarang maupun di masa mendatang. Lop yu.
15. Pihak-pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang sudah membantu dalam penyelesaian dan penyusunan tesis ini.

Atas dukungan baik secara moril maupun materil yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Demikian tesis mengenai Mekanisme Kolaboratif Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Indramayu ini disusun. Semoga memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Yogyakarta, 11 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Fitriana Maghdalena
NIM: 22200012021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritis.....	16
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	36
 BAB II: KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDRAMAYU:	
AKTOR DAN KEBIJAKAN.....	38
A. Sekilas Demografi Kabupaten Indramayu	38
B. Pemahaman Masyarakat Indramayu Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak	42
C. Profil Lembaga.....	47
1. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.....	48
2. Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu.....	50

3. Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Indramayu.....	53
4. Dinas Sosial.....	56
D. Alur Pelayanan dan Fungsi Sektor.....	58
1. Alur Pelayanan ICETA	60
2. Alur Pelayanan P2TP2A	62
3. Alur Pelayanan Dinas Sosial	64
4. Alur Pelayanan YSPDA	67
5. Alur Pelayanan PPA.....	70

BAB III: MEMAHAMI PERAN DAN FUNGSI PEMANGKU

KEPENTINGAN	71
A. Koordinasi.....	73
1. Leading Sektor Penanganan Kasus	73
2. Komunikasi dan Relasi Antar Lembaga.....	78
3. Memorandum of Understanding (MoU)	84
4. Rujukan	89
B. Potensi dan Tantangan	93
1. Potensi	94
2. Tantangan	99

BAB IV: IMPLIKASI KOLABORASI PENANGANAN KEKERASAN

SEKSUAL PADA ANAK	103
--------------------------------	------------

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA	122
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	129
--------------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	140
-----------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Informan Penelitian.....	31
-----------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2: Alur Pelayanan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak.....	58
Gambar 3.1: Bagan Koordinasi Pemangku Kepentingan	73
Gambar 3.2: Rujukan Antar Sektor.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana para pemangku kepentingan di Kabupaten Indramayu bekerja sama dalam menangani kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan bertujuan memuaskan pelaku yang disertai tekanan fisik atau psikologis. Dampaknya mencakup masalah fisik seperti kehamilan, infeksi menular seksual, dan luka, serta dampak psikologis seperti trauma, depresi, dan kehilangan rasa percaya diri. Secara sosial, korban dapat mengalami penolakan, stigma, dan hilangnya kesempatan pendidikan serta pekerjaan. Kekerasan ini bisa berupa kontak fisik (pencabulan, pemerkosaan) atau tanpa kontak fisik (mempertontonkan materi seksual, pornografi anak).¹

Pada tahun 2024 dari bulan Januari sampai Desember komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) menerima 1604 aduan dengan kasus sebanyak 2057 yang terbagi menjadi dua klaster yaitu pemenuhan hak anak sebesar 67% dan klaster perlindungan khusus anak sebesar 33% dalam kasus klaster perlindungan khusus anak kasus anak korban kejahatan seksual menempati tingkat tertinggi dengan angka 265 kasus, laporan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 dimana kasus anak korban kejahatan seksual hanya terdapat 252 kasus, hal tersebut sangat

¹ I Dewa Ayu Maythalia Joni and Endang R. Surjaningrum, "Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru Dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Diversita* 6, no. 1 (2020): 20–27.

memprihatinkan karena hampir setiap hari ada yang mengadukan anak menjadi korban kejahatan seksual dan masih banyak anak yang menjadi korban namun belum terdata di KPAI.² Kekerasan seksual pada anak masih sering terjadi di masyarakat dan dapat menyebabkan dampak traumatis seumur hidup, termasuk gangguan sosial, emosi, dan kognitif, masalah kesehatan mental seperti halusinasi dan depresi, serta perilaku berisiko seperti penyalahgunaan obat dan aktivitas seksual dini. Pengalaman kekerasan ini tertanam dalam bawah sadar anak dan berpotensi membentuk pola kekerasan yang berkelanjutan hingga dewasa.³

Pencegahan kekerasan terhadap anak perlu dilakukan secara menyeluruh, melibatkan pendidikan, pemahaman tentang hak anak, penguatan keluarga, dukungan sosial, dan penegakan hukum yang tegas untuk pelaku kekerasan.⁴ Undang-Undang Nomor 35 Pasal 72 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, salah satu peran masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.⁵ Pekerjaan sosial adalah bidang yang berwenang untuk meningkatkan kemampuan individu

² KPAI R.N, Data Perlindungan Anak 2024 (2025).

³ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (2021): 56–60.

⁴ Yayan Agus Siswanto, Fajar Rachmad Dwi Fajar Miarsa, and Sudjiono, "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–67, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>.

⁵ RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

dalam menjalankan fungsi sosial melalui interaksi, guna mereka dapat beradaptasi dengan kehidupan secara optimal, pekerja sosial dapat bekerja sama dengan berbagai profesi untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak korban kekerasan.⁶

Kehadiran orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah kekerasan pada anak, ayah dan ibu tidak hanya berfungsi sebagai kepala keluarga atau pengasuh, tetapi juga orang tua berperan dalam mengawasi mendidik serta menjadi panutan terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak, orang tua membantu anak-anak untuk lebih memahami risiko kekerasan seksual dan mengembangkan kemampuan untuk menjaga diri.⁷ Namun sayangnya di Kabupaten Indramayu banyak kasus orang tua yang harus meninggalkan anaknya karena mereka memilih menjadi pekerja migran. Kabupaten Indramayu dikenal memiliki potensi pertanian yang tinggi di Jawa Barat namun dengan kemampuan tersebut tingkat kemiskinan di daerah ini masih cukup tinggi.⁸ Dari kemiskinan tersebut banyak masyarakat yang memilih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan mayoritas masyarakat membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.⁹ Salah satu faktor yang mendorong masyarakat memilih

⁶ Binahayati Rusyidi, "Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak," *Sosio Informa* 4, no. 1 (2018): 375–87, <https://doi.org/10.33007/inf.v4i1.1416>.

⁷ Ikeu Nurhidayah and Neng Lani Ligina, "The Role of Parents in Preventing Sexual Violence on Elementary School Children in Bandung," *Jurnal Keperawatan* 9, no. 2 (2018): 109, <https://doi.org/10.22219/jk.v9i2.5454>.

⁸ Sumarta Sumarta and Abas Abdul Jalil, "Analisis Sosial Ekonomi Pembangunan Masyarakat Indramayu," *Khulasah: Islamic Studies Journal* 4, no. 2 (2023): 31–44, <https://doi.org/10.55656/kisj.v4i2.75>.

⁹ Zulfan Fikriansyah and Aan Julia, "Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus: Di Desa Bongas Kecamatan Bogas Kabupaten

bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri adalah keinginan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga jenjang tertinggi, mereka berharap bahwa dengan pendidikan yang baik, anak-anaknya akan memiliki masa depan yang lebih baik.¹⁰

Pemerintah Kabupaten Indramayu mengupayakan penanganan kekerasan seksual pada anak dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 18 Tahun 2012 Tentang Pencegahan, Perlindungan, dan Pemulihan Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Indramayu. Pasal 8 poin 1 menyatakan bahwa P2TP2A Kabupaten dapat berkoordinasi dengan Bagian Agama dan Kesra Setda Kabupaten Indramayu, kecamatan, serta pihak-pihak yang berkompeten dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹¹

Dalam implementasinya peraturan daerah pasal 8 menyatakan bahwa yang menjadi leading sektor dari penanganan kekerasan pada perempuan dan anak adalah P2TP2A yang berada dibawah naungan DP3AP2KB, lembaga ini berkolaborasi melakukan dan bekerjasama dengan berbagai lembaga aktif seperti Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, Dinas Sosial, dan UPPA (unit pelayanan perempuan dan anak) di bawah naungan SatReskrim Polres Indramayu. Penanganan kekerasan seksual pada anak tidak bisa dilakukan oleh

Indramayu),” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 25–32, <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1889>.

¹⁰ Randi Ardiansyah, Berti Mandala Putra, and Widia Widia, “Kondisi Sosial Ekonomi Dan Pendidikan Anak Pada Rumah Tangga Tenaga Kerja Wanita (TKW),” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 11 (2022): 5134–42, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1160>.

¹¹ “Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012, Tentang Pencegahan, Perlindungan Dan Pemulihan Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Di Kabupaten Indramayu,” n.d.

satu pihak saja, melainkan memerlukan koordinasi dan peran aktif dari berbagai elemen, seperti Pemerintah, Komnas HAM, KPAI, PPT, LSM, Ormas, perguruan tinggi, media massa, lembaga profesi, aparat hukum, politisi, tokoh masyarakat, keluarga, serta masyarakat.¹²

Penelitian ini menggunakan model penta helix untuk melihat kolaborasi beberapa pihak dalam menangani kekerasan seksual pada anak. Penta helix adalah pengembangan dari model triple helix yang awalnya dikemukakan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff pada tahun 2000. Triple Helix berfokus pada tiga elemen utama yaitu akademisi, bisnis, dan pemerintah yang berkolaborasi untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ekonomi. Dengan meningkatnya kebutuhan untuk menangani isu-isu sosial yang semakin kompleks, model ini kemudian berkembang menjadi sinergi yang lebih luas. Penta helix memiliki lima model ABCGM (Academic, Business, Community, Government, Media) dengan menambahkan Masyarakat dan media sebagai elemen kelima. Model ini bertujuan untuk mengintegrasikan semua sektor yang relevan, dari pemerintah hingga media, di Indonesia model ini sudah banyak digunakan untuk mengatasi tantangan sosio ekonomi yang kompleks, menggerakkan inovasi, serta memperkuat upaya penyelesaian masalah secara efektif dan berkelanjutan.¹³

Penelitian ini menjadi penting karena kekerasan seksual pada anak merupakan masalah yang tidak hanya menimbulkan dampak individual berupa

¹² Desi Sommaliagustina and Dian Cita Sari, "Psychopolytan (Jurnal Psikologi) Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" 1, no. 2 (2018): 76–85, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan/>.

¹³ Lina Putri Pasaribu, Nurliana Cipta Apsari, and Sri Sulastri, "Kolaborasi Penta Helix Dalam Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi," *Share : Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 140.

trauma fisik dan psikis, tetapi juga berdampak sosial yang lebih luas seperti stigma, putus sekolah, dan hilangnya kesempatan hidup layak. Kompleksitas masalah tersebut menuntut adanya mekanisme penanganan yang terintegrasi lintas sektor, sebab tidak ada satu lembaga pun yang mampu menanganinya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai mekanisme kolaborasi pemangku kepentingan bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk dilakukan.

Penelitian terdahulu memang telah membahas kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual, namun umumnya lebih menitikberatkan pada efektivitas kebijakan atau peran pemerintah. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya melihat kolaborasi secara formal, tetapi juga menyoroti rujukan antar lembaga, koordinasi non-formal, serta tantangan ketiadaan forum tetap dan SOP lintas sektor. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana kolaborasi berjalan dalam konteks sosial yang penuh keterbatasan.

Alasan pemilihan Kabupaten Indramayu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa daerah ini memiliki angka peningkatan kasus kekerasan seksual yang tinggi, menurut data dari Juli 2021 sampai Januari 2022 terjadi 10 kasus kekerasan seksual pada anak, kemudian pada Januari 2022 hingga Agustus 2023 terjadi 25 kasus kekerasan seksual pada anak, jumlah tersebut belum termasuk kasus yang tidak dilaporkan kepada pemangku

kepentingan.¹⁴ Selain itu faktor sosial ekonomi khas seperti kemiskinan struktural, rendahnya pendidikan, dan fenomena migrasi TKI/TKW yang mengurangi pengawasan terhadap anak. Kondisi ini membuat Indramayu menjadi wilayah yang strategis untuk mengkaji bagaimana pemangku kepentingan bekerja sama dalam merespons masalah yang kompleks.

Fokus penelitian pada koordinasi pemangku kepentingan dipilih karena penanganan kasus kekerasan seksual tidak bisa berdiri pada upaya sektoral. Justru titik krusialnya terletak pada sejauh mana lembaga-lembaga yang berbeda seperti P2TP2A, Dinas Sosial, UPPA, dan LSM mampu membangun mekanisme komunikasi, rujukan, dan kerja sama yang efektif. Koordinasi inilah yang menentukan apakah layanan dapat diberikan secara cepat, tepat, dan berkesinambungan bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi celah pengetahuan tentang bagaimana koordinasi lintas lembaga dijalankan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks Indramayu.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Fokus Masalah

Fokus masalah diartikan sebagai suatu upaya dalam menjelaskan dan memaparkan penelitian yang dapat diukur menggunakan identifikasi, identifikasi masalah merupakan batasan penelitian terhadap objek yang akan di teliti permasalahannya. Kabupaten Indramayu memiliki beberapa masalah

¹⁴ Dicky Andika Sulaeman et al., “Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Sekolah DasarJ” in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Tahun 2023 LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon*, 2023, 524–33.

sosial yang kemudian memicu terjadinya masalah baru seperti kekerasan seksual pada anak.

Identifikasi ini dibuat untuk mengetahui mekanisme kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam mencegah kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini akan membahas tentang Mekanisme Kolaborasi (proses koordinasi antar lembaga, pola kerja sama dalam penanganan, pembagian tanggung jawab dan peran antar pihak). Faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi. Dan Implikasi kolaborasi terhadap penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Implementasi model penta helix (Analisis model ABCGM).

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana mekanisme kolaborasi antar pemangku kepentingan terjadi?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat bagi kolaborasi antar pemangku kepentingan?
- c. Bagaimana implikasi bagi pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu?

3. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan timbal balik bagi penulis maupun lembaga terkait.

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah informasi dan kajian di program jurusan interdisciplinary Islamic studies konsentrasi pekerjaan sosial mengenai pembahasan mekanisme

kolaboratif pemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini bisa menjadi masukan dan rujukan dalam mengambil keputusan dalam mengeksplorasi berbagai aspek kolaborasi dan efektivitas mekanisme yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak, penelitian ini menjadi masukan untuk para pengambil kebijakan dan pembuat program di bidang pekerjaan sosial, pemangku kepentingan dan program jurusan interdisciplinary Islamic studies konsentrasi pekerjaan sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis mekanisme kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu, termasuk bagaimana koordinasi, komunikasi, rujukan, serta bentuk kesepakatan formal maupun non formal dijalankan dalam praktik.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas kolaborasi, baik dari aspek regulasi, sumber daya, profesionalitas pekerja sosial, maupun dinamika hubungan antar lembaga.
3. Untuk mengkaji implikasi kolaborasi terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat,

membentuk layanan yang lebih responsif, serta menilai sejauh mana model Penta Helix dapat berjalan dalam konteks sosial-ekonomi Indramayu.

D. KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka adalah kajian hasil penelitian atau karya dengan topik yang sama, yaitu karya ilmiah lain yang merupakan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.¹⁵ (Penyusun, 2021). Kekerasan seksual pada anak dapat di cegah melalui beberapa aspek dan peran yang perlu di perhatikan yaitu, Edukasi seksual sejak dini, pemahaman agama, penguatan keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan pengawasan lingkungan, dan penguatan literasi media. Selain itu Pemangku kepentingan dan beberapa kolaborasi didalamnya juga memiliki andil dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

1. Mekanisme kolaboratif antar pemangku kepentingan

Kolaborasi lintas sektoral di Kota Surabaya dalam penanganan kekerasan seksual pada anak dipicu oleh kepentingan bersama dan keterbatasan sumber daya. Pemerintah Kota Surabaya memimpin inisiatif untuk melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta dalam upaya kolaboratif. Kolaborasi ini didukung oleh aturan yang jelas, dialog tatap muka, serta pembangunan kepercayaan antar aktor. Meski kasus kekerasan meningkat, hal ini dianggap positif karena masyarakat semakin sadar dan

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2021).

berani melaporkan kekerasan yang terjadi.¹⁶ Hadriyo, dkk., menganalisis kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual di Semarang yang diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2016 dan menyoroti pentingnya kerja sama antar pemangku kepentingan yang melibatkan dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Fokus utama penelitian adalah peningkatan kesadaran publik serta pelaksanaan program sosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual di Semarang melibatkan kolaborasi yang efektif di antara berbagai pihak terkait, berdasarkan kerangka kerja collaborative governance dari Ansel dan Gash, proses kolaborasi ini mencakup berbagai tahapan penting dalam penanganan kekerasan seksual.¹⁷

2. Edukasi Seksual dan Peran Serta masyarakat

Pendidikan seksualitas sangat penting diajarkan sejak usia dini, tujuannya adalah agar anak dapat melindungi dirinya dari berbagai bentuk kekerasan atau pelecehan seksual yang masih rawan terjadi saat ini. Selain itu, pendidikan ini juga membantu membentuk perilaku positif, mencegah penyalahgunaan seks, dan membantu anak dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan seksual maupun gender.¹⁸ Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak

¹⁶ C. Pagitha Rahmawati and Diana Hertati, "Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444>.

¹⁷ H. I. Brillianto, S. Suwitri, and T. Afrizal, "Analisis Kolaborasi Stakeholder Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Semarang," *Journal of Public Policy*, 2024, 1–19.

¹⁸ Agida Hafsyah Febriagivary, "Mengenalkan Pendidikan Seksualitas Untuk Anak Usia Dini Melalui Metode Bernyanyi," *Children Advisory Research and Education Jurnal CARE* 8, no. 2 (2021): 2021, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JPAUD>.

salah satunya dengan memberikan edukasi kepada orang tua dan anak melalui program underwear rules, dan personal safety skills. Personal safety skills sendiri adalah keterampilan penting yang harus dikuasai anak untuk melindungi diri dari kekerasan seksual. Edukasi tentang personal safety skills dilakukan dengan menampilkan video animasi mulai dari cara mengenali pelaku, melindungi diri, hingga melaporkan kejadian kepada orang terdekat. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan keterampilan ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan anak usia sekolah dalam mencegah kekerasan seksual.¹⁹

Sejalan dengan penelirian diatas, hal tersebut di perkuat dengan penelitian Sheylla dan Putri yang memaparkan bahwa penggunaan video animasi sebagai media edukasi seksual efektif dalam meningkatkan pengetahuan anak tentang seksualitas serta cara mencegah pelecehan seksual, yang diharapkan dapat memengaruhi perilaku anak agar lebih waspada terhadap tindakan pelecehan dari lingkungan sekitar.²⁰ Teknologi digital memberikan banyak manfaat, namun juga membawa risiko seperti penyalahgunaan media digital untuk kekerasan seksual terhadap anak-anak. Edukasi literasi digital adalah salah satu cara penting untuk mencegah kekerasan seksual pada anak yang bertujuan untuk melindungi anak dari risiko di dunia maya. Edukasi diberikan dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan praktis untuk

¹⁹ Rifka Putri Andayani et al., "Implementasi Personal Safety Skill Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar," *Jurnal Abdi Mercusuar* 2, no. 2 (2022): 51–58, <https://doi.org/10.36984/jam.v2i2.324>.

²⁰ Sheylla Septina Margaretta and Putri Kristyaningsih, "The Effectiveness of Sexual Education on Sexuality Knowledge and How To Prevent Sexual Violence in School Age Children," *JIKBW Press*, 2020, 57–61.

melindungi diri anak-anak dari ancaman online, keberhasilan program dari artikel ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara anak-anak, orang tua, pengasuh, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang aman.²¹

Untuk mengurangi risiko kekerasan seksual pada anak, keluarga berperan dalam melindungi anak dengan berbagai cara yaitu memberikan pengetahuan tentang kekerasan seksual terutama kepada anak yang mulai tumbuh dewasa, menjelaskan bahaya dan dampaknya, memberikan edukasi seksual, menjelaskan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh tanpa izin, serta membantu anak mengenali lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, keluarga perlu menanamkan norma, nilai, dan budaya masyarakat.²²

Pendidikan keluarga berperan dalam membangun kerja sama antara sekolah dan orang tua untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi mereka dalam mendidik anak, mengingat pentingnya peran keluarga dalam mencegah kekerasan seksual, setiap keluarga perlu dibekali pengetahuan yang mendukung pengasuhan anak secara maksimal. Peran orang tua sangat memengaruhi perilaku dan kebiasaan anak sehari-hari, upaya pencegahan kekerasan seksual oleh orang tua mencakup pendidikan seksual, pencegahan kekerasan, pola asuh yang tepat, serta keterlibatan aktif dalam pengasuhan.²³

²¹ D I Sanggar and Mindulahin Jambi, "Upaya Edukasi Literasi Digital Melalui Media Online Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak-anak" 5, no. 5 (2024): 9279–84.

²² Erika Vivian Nurchahyati and Martinus Legowo, "Peran Keluarga Dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2022): 22, <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1.4735>.

²³ Tetti Solehati et al., "Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022): 2201–14, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>.

Peningkatan kapasitas masyarakat berperan penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual, menurut Sri Mulyati, dkk. dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah kekerasan seksual yang pada akhirnya terbentuk lingkungan yang lebih aman.²⁴

Pendidikan berkualitas di sekolah membantu membentuk karakter siswa, dan guru memegang peran kunci dalam proses ini. Di SD Negeri 2 Sudagaran, guru mencegah pelecehan seksual dengan memberikan pendidikan seks serta pembinaan berdasarkan nilai-nilai agama. Selain itu, mereka juga melatih anak agar terbuka dalam berkomunikasi, dan menerapkan pendidikan karakter untuk mencegah perilaku menyimpang.²⁵ Agama dapat menjadi solusi dalam pencegahan kekerasan seksual dengan mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai tersebut dapat implementasikan melalui pemahaman agama yang baik guna membantu menghindari kejahatan, teladan orang tua yang berperan penting dalam membentuk perilaku anak, pembekalan pengetahuan tentang alat reproduksi, dan cara menjaga diri dari pengaruh buruk bagi anak. Lingkungan yang positif juga menjadi faktor kunci dalam perkembangan anak, karena

²⁴ Sri Mulyati et al., “Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Perempuan, Anak, Dan Remaja Di Kelurahan Pulogebang Dan Desa Telajung,” *Community Engagement & Emergence Journal* 3, no. 1 (2022): 67–77.

²⁵ Dian Pangestuti, Okto Wijayanti, and Santhy Hawanti, “Persepsi Guru Tentang Pendidikan Seks Di SD Negeri 2 Sudagaran,” *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021): 39–44.

lingkungan yang baik akan mendukung pembentukan karakter yang kuat dan mencegah perilaku menyimpang.²⁶

3. Kebijakan dan pemangku kepentingan

Undang-Undang Kejahatan Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, Pasal 85, mengatur bahwa masyarakat dan keluarga dapat berperan dalam pencegahan, dukungan, pemulihan, dan pemantauan kasus kekerasan seksual. Peran masyarakat sangat penting untuk mencegah kejahatan kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran agar lebih waspada.²⁷

Upaya Pemangku kepentingan dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak. Pemerintah Kota Surabaya telah aktif berperan sebagai regulator dengan menetapkan regulasi yang menjadi landasan hukum untuk semua kegiatan terkait perlindungan anak di Kota Surabaya, aturan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. Selain itu, pemerintah juga mengadakan program seperti kampanye di sekolah, hotline darurat, dan tempat perlindungan untuk korban kekerasan. Walaupun kasus kekerasan yang dilaporkan meningkat, ini terjadi karena semakin banyak orang yang berani melapor, bukan karena kekerasan bertambah. Kerja sama antar lembaga mendukung perlindungan anak, Pemerintah bertindak sebagai pembuat aturan dan penyedia fasilitas untuk mencegah kekerasan, serta

²⁶ Ulfa Khoirothul Ummah and Heri Kurnia, "Agama Sebagai Benteng Untuk Mencegah Kasus Kekerasan Seksual Anak Sejak Dini," *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 1, no. 2 (2021): 83–90.

²⁷ Ujang Badru Jaman and Agung Zulfikri, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Dan HAM West Science* 1, no. 1 (2022): 1–7.

bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung perlindungan anak.²⁸

Lembaga swadaya masyarakat berperan dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual pada anak, LSM Sumatera Utara Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) merupakan organisasi yang berperan serta dalam membantu mewujudkan hak-hak anak yang belum terpenuhi.²⁹

Dari beberapa literatur diatas penelitian tersebut hanya fokus pada kolaborasi antara pemangku kepentingan saja, tidak memperhatikan aspek permasalahan sosial yang dialami oleh daerah masing-masing yang tentunya berpengaruh dalam pencegahan kekerasan seksual, menurut penulis hal tersebut perlu diketahui dan di teliti lebih lanjut. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kolaborasi pemerintah dalam mencegah kasus kekerasan seksual, tanpa membahas latar belakang atau masalah sosial yang mendasari terjadinya kekerasan seksual pada anak. Penulis akan mengangkat topik tentang bagaimana pemerintah saling berkontribusi dan bekerja sama dalam mencegah kekerasan seksual pada anak di Indramayu dengan berbagai masalah sosial yang memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak, seperti kemiskinan, pola asuh yang kurang baik, dan faktor pendukung lainnya. Dari penjelasan tersebut maka penulis akan melakukan peneltian dengan judul

²⁸ Dimas Irfan Maulana and Is Fadhilah, “Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Di Wilayah Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)” 1192, no. 09 (2024): 304–17.

²⁹ Maurice Siburian and Arozatulo Maendrofa, “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak,” *Jurnal Rectum* 3, no. 1 (2021): 100–106.

“Mekanisme Kolaboratif Pemangku Kepentingan dalam Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Indramayu”.

E. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis adalah rujukan konsep dan teori yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami fenomena dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan kerangka teori penta helix, penta helix merupakan sebuah konsep yang menjelaskan tentang peran dan kerjasama antara pihak dalam mengatasi suatu masalah untuk mencapai tujuan bersama. Penta helix sendiri bukan teori melainkan sebuah kerangka konseptual untuk melihat bagaimana para aktor dalam sebuah relasi bekerja dan bereaksi. Sebelum terbentuknya penta helix, Henry Etzkowitz mengembangkan konsep helix dalam triple helix dimana ada tiga pihak yaitu universitas, industri dan pemerintah yang saling bekerjasama dan dianggap mampu menciptakan inovasi dan mendorong ekonomi.

Kemudian dikembangkan lagi menjadi quardruple helix dengan menambahkan unsur masyarakat sebagai sebagai aktor ke empat kehadiran masyarakat yang dilihat dari aspek sosial dan budaya dianggap penting dalam mewujudkan sebuah inovasi. Perkembangan berikutnya barulah muncul konsep penta helix yang memiliki lima unsur penting yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media, penta helix sendiri hadir dalam bentuk yang lebih luas dalam menciptakan sebuah inovasi dalam ruang kolaboratif.

1. Terbentuknya konsep helix

Konsep Triple Helix yang dikembangkan oleh Henry Etzkowitz bukanlah kerangka yang lahir tanpa landasan teoritis. Dalam buku ini, Etzkowitz secara eksplisit menjelaskan bahwa Triple Helix dibangun dari fondasi teori sosial klasik serta pemikiran sosiologi ilmu dan inovasi. Etzkowitz menyatakan bahwa ide-ide dari Georg Simmel, Karl Marx, dan Max Weber memberikan pengaruh langsung terhadap konstruksi konseptual Triple Helix, khususnya dalam memahami hubungan antar lembaga yang saling berinteraksi namun tetap otonom sebagian “*interconnected and partially autonomous institutional spheres*”.³⁰

Dari Georg Simmel, Etzkowitz mengadopsi analisis tentang hubungan triadik, yang dalam konteks Triple Helix diwujudkan sebagai interaksi antara universitas, industri, dan pemerintah. Etzkowitz menulis bahwa masing-masing aktor dalam Triple Helix dapat bertindak sebagai *tertius gaudens*, yaitu pihak ketiga yang memediasi dan memfasilitasi interaksi dua pihak lainnya untuk menciptakan inovasi. Pendekatan triadik ini menjelaskan mengapa model Triple Helix lebih dinamis dibanding hubungan bilateral (seperti hanya antara pemerintah, universitas, atau industri universitas) yang cenderung terbatas dan rentan konflik.

Selain George Simmel, pemikiran Karl Marx digunakan untuk menjelaskan transisi masyarakat dari struktur feodal ke masyarakat kapitalistik yang ditandai oleh pemisahan ekonomi dari tatanan sosial

³⁰ Henry Etzkowitz, *The Triple Helix, The Triple Helix*, 2008.

tradisional. Etzkowitz mencatat bahwa Marx telah mengidentifikasi ilmu pengetahuan sebagai benih masa depan ekonomi berbasis pengetahuan. Sebagai contoh, Etzkowitz menyebut penemuan pewarna kimia oleh William Henry Perkin, yang kemudian menjadi industri kimia di Jerman, sebagai cikal bakal hubungan antara riset dan ekonomi modern.

Etzkowitz juga merujuk pada Max Weber, terutama mengenai peran etika dan nilai-nilai dalam membentuk perkembangan ekonomi. Ia menunjukkan bahwa ide-ide seperti etika Protestan yang mendasari rasionalisasi dan kerja keras menjadi kekuatan pendorong dalam masyarakat kapitalistik Barat. Dalam konteks Triple Helix, nilai-nilai ini diterjemahkan menjadi budaya inovasi dan kewirausahaan yang kini semakin terinternalisasi dalam lembaga-lembaga akademik dan pemerintahan.

Melalui integrasi pemikiran ketiga tokoh besar ini, Etzkowitz membangun pemahaman bahwa masyarakat berbasis pengetahuan memerlukan bentuk baru hubungan sosial antar institusi. Triple Helix adalah kerangka yang merepresentasikan perubahan struktural ini, yaitu ketika universitas tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, industri tidak hanya sebagai penghasil barang, dan pemerintah tidak hanya sebagai regulator, melainkan semuanya saling bertukar peran untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan.

Konsep Triple Helix merupakan respons Henry Etzkowitz terhadap perubahan struktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern yang semakin berbasis pengetahuan. Dalam buku ini, Etzkowitz menjelaskan

bahwa model-model lama, seperti pendekatan statist (di mana pemerintah dominan) dan laissez-faire (dengan institusi yang sepenuhnya terpisah), tidak lagi mampu menjelaskan kompleksitas dan kebutuhan kolaboratif dalam inovasi masa kini. Ia menyatakan bahwa relasi bilateral antar institusi sering kali menghasilkan konflik atau kebuntuan, sedangkan hubungan triadik menawarkan mekanisme yang lebih fleksibel, dinamis, dan inovatif. Oleh karena itu, Triple Helix yang terdiri dari universitas, industri, dan pemerintah diciptakan untuk menangkap realitas bahwa ketiga institusi tersebut kini saling berinteraksi, bertukar peran, dan bersama-sama mendorong proses inovasi.

Etzkowitz melihat bahwa dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peran-peran tradisional tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan zaman. Universitas tidak bisa hanya menjadi lembaga pendidikan, pemerintah tidak hanya menjadi regulator, dan industri tidak hanya sebagai produsen. Ketiganya harus masuk dalam suatu jejaring kolaboratif, saling melengkapi dan berbagi fungsi. Dengan demikian, Triple Helix bukan hanya model deskriptif, tetapi juga merupakan kerangka konseptual dan normatif untuk membangun sistem inovasi yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi global.

2. Triple Helix, Quardruple Helix, dan Penta Helix

Kata "helix" pada awalnya berarti bentuk spiral, seperti ulir pada sekrup. Dalam sejarah, istilah ini merujuk pada alat bernama "triple helix water screw" yang digunakan di Mesopotamia kuno untuk menaikkan air ke

tingkat lebih tinggi, terutama untuk mengairi Taman Gantung Babilonia, salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Henry Etzkowitz mengembangkan konsep "helix" ini dalam bentuk "Triple Helix" untuk menggambarkan kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah. Menurutnya, ketiga pihak ini bekerja bersama-sama dalam menciptakan inovasi dan mendorong ekonomi, seperti fungsi sistem water screw tadi.

Dalam ilmu akademik, istilah "helix" digunakan untuk menjelaskan kerja sama antara berbagai pihak dalam mengelola program pembangunan atau pelayanan publik. Model kolaborasi ini mulai dari "triple helix" (universitas, industri, pemerintah) hingga yang lebih kompleks, seperti "penta helix", yang melibatkan lebih banyak pihak. Setiap model helix ini berperan dalam mencari solusi masalah sosial atau ekonomi dengan tetap mengikutsertakan tiga unsur utama: pemerintah, industri, dan universitas. Tujuan dari pendekatan helix adalah meningkatkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama yang terstruktur. Setiap pihak memiliki peran masing-masing, dan dengan bekerja bersama, ketiga pihak ini bisa membentuk panduan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan. Pendekatan helix ini terus berkembang dan diperbaiki untuk menghadapi tantangan zaman. Lebih banyak lagi tentang jenis-jenis helix yang diciptakan para akademisi akan dijelaskan di bagian berikutnya.

Konsep Triple Helix menggambarkan kolaborasi antara tiga aktor utama: perguruan tinggi, industri, dan pemerintah, yang bekerja sama untuk mendorong inovasi berbasis pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi. Konsep

ini, diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff, menekankan bahwa inovasi tidak hanya dilakukan oleh industri, melainkan juga didukung oleh penelitian dari universitas serta kebijakan pemerintah. Kolaborasi ini memungkinkan universitas, industri, dan pemerintah berbagi peran, misalnya, dengan perguruan tinggi yang aktif dalam pengembangan produk untuk industri dan pemerintah menyediakan regulasi yang mendukung inovasi.

Sebagai pengembangan dari Triple Helix, konsep Quadruple Helix menambahkan unsur masyarakat sebagai aktor keempat. Masyarakat berperan penting dalam memberikan ide, masukan, dan dukungan terhadap inovasi melalui budaya, media, dan teknologi komunikasi. Quadruple Helix mengakui bahwa pendekatan berbasis pengetahuan perlu disertai aspek sosial dan budaya untuk menghasilkan inovasi yang diterima secara luas. Kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan masyarakat menciptakan inovasi yang lebih beragam, seperti dalam ekonomi kreatif, di mana inovasi terjadi di bidang seni, media, dan budaya selain teknologi.

Perkembangan berikutnya adalah konsep Penta Helix, yang muncul untuk memperluas kerangka kerja sebelumnya dengan menambahkan unsur kelima. Konsep Penta Helix muncul untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam model Triple Helix (yang melibatkan pemerintah, industri, dan perguruan tinggi) dan Quadruple Helix (yang menambahkan unsur masyarakat). Kedua model ini memiliki keterbatasan dalam mengatasi tantangan baru atau perubahan yang tidak terduga karena sifat interaksi antara pihak-pihak ini cenderung stagnan. Selain itu, model Triple dan Quadruple

Helix masih kurang dalam hal keterwakilan politik dan demokrasi. Artinya, banyak keputusan yang diambil mungkin tidak mencerminkan aspirasi dan keterlibatan yang luas dari masyarakat atau kelompok-kelompok berbeda di dalamnya. Untuk mengatasi masalah ini, Penta Helix menambahkan satu unsur baru, sehingga menciptakan ruang inovasi yang lebih luas, lintas disiplin, dan kolaboratif.

Implementasi kolaborasi tidak dapat dilepaskan dari proses turunan kebijakan publik, di mana mekanisme kolaboratif perlu dimanifestasikan melalui program, proyek, dan kegiatan konkret. Model kolaborasi Pentahelix juga tidak luput dari tantangan seperti perbedaan visi dan kepentingan antarpihak, lemahnya komunikasi, birokrasi yang kaku, serta keterbatasan sumber daya. Namun demikian, model ini tetap menawarkan berbagai peluang, seperti terbukanya akses terhadap sumber daya dan jaringan, efisiensi kerja, hingga kemampuan responsif terhadap persoalan sosial.

Keberhasilan kolaborasi dalam model Pentahelix diukur melalui sejumlah indikator, yaitu: komitmen personal dari setiap aktor yang terlibat, efektivitas komunikasi dan interaksi, kesesuaian konteks kerja sama seperti dukungan regulasi, serta pelaksanaan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret. Dengan demikian, model kolaborasi Pentahelix menjadi landasan yang penting dalam pengembangan program berbasis kolaborasi lintas sektor, terutama dalam konteks pembangunan

sosial dan ekonomi lokal yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan zaman.³¹

3. Lima Unsur Penta Helix

Unsur tambahan dalam konsep penta helix ini adalah media, yang dimana media dianggap dapat membantu memperkuat penyebaran informasi dan keterlibatan publik secara lebih efektif. Penta Helix dikenal dengan lima model atau ABCGM, yang mencakup Akademisi (Academy), Bisnis (Business), Komunitas (Community), Pemerintah (Government), dan Media. Dalam model ini, masyarakat diperluas menjadi "komunitas," sehingga partisipasi masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi sebagai aktor aktif. Media juga diberi peran khusus karena memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas, yang sangat penting dalam menggalang dukungan atau memberikan transparansi kepada masyarakat. Berikut lima model tersebut:

a. Academic

Akademisi atau perguruan tinggi berperan sebagai pusat penelitian dan pengembangan, menyediakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung inovasi. Dalam model ini, universitas bukan hanya tempat pendidikan tetapi juga wadah bagi penelitian yang menghasilkan produk baru, memberikan pelatihan keterampilan, serta membantu transfer teknologi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan industri. Peran

³¹ May Agus Swandhono et al., *Sinergi Pentahelix Pendekatan Kolaboratif Untuk Pengembangan Technosociopreneurship*, 2025

akademisi dapat dilihat melalui penggunaan data dan teori dari kajian akademis serta landasan hukum yang relevan. Akademisi berkontribusi dengan menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis data empiris yang dapat digunakan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan mekanisme yang lebih efektif.

b. Business

Bisnis/Industri bertanggung jawab atas penerapan hasil riset menjadi produk atau layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Peran Perusahaan dapat dilihat dari Kerjasama atau mitra potensial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Bagaimana perusahaan berkontribusi dengan mendanai program edukasi masyarakat, menyediakan pelatihan, atau mendukung sebuah program kesejahteraan keluarga rentan.

c. Community

Masyarakat atau komunitas bertindak sebagai pengguna, penerima, dan pengawas inovasi. Mereka memiliki peran dalam menyuarakan kebutuhan, norma sosial, dan aspirasi yang dapat memengaruhi arah inovasi. Dengan menyertakan masyarakat dalam proses inovasi, inovasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan diterima dengan baik. Masyarakat juga dapat berperan sebagai komunitas kreatif yang membantu menghasilkan ide-ide inovatif. Organisasi seperti Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu di Indramayu sangat berperan dalam edukasi, pendampingan korban, dan advokasi terkait pencegahan kekerasan seksual

pada anak. Selain yayasan, tokoh masyarakat, pemimpin adat, atau tokoh agama setempat juga bisa diajak bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam pencegahan kekerasan seksual.

d. Government

Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan regulasi, kebijakan, serta lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi dan inovasi. Melalui kebijakan publik, pemerintah dapat memberikan insentif, perlindungan hukum, dan program pendanaan untuk mendukung penelitian serta pengembangan hal baru. Pemerintah juga memastikan regulasi yang menjaga keseimbangan antara inovasi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak serta tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam alokasi dana, pengawasan, serta penegakan Perda yang mendukung upaya pencegahan. Peran pemerintah dalam penelitian ini meliputi; Dinas Sosial, P2TP2A, dan Sat Reskrim Polres Indramayu.

e. Media

Media berperan besar dalam penyebaran informasi, pembentukan opini publik, dan menggalang kesadaran masyarakat luas. Dengan adanya media, kampanye atau informasi mengenai perlindungan anak dan bahaya kekerasan seksual dapat lebih mudah diterima masyarakat. Media juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas para pemangku kepentingan. Beberapa pemangku

kepentingan seperti P2TP2A dan yang lainnya memiliki media berupa informasi berita yang berada di website masing-masing.

Unsur kelima Penta Helix tidak selalu didefinisikan sebagai media, melainkan sesuatu yang lebih luas dan fleksibel. Calzada berpendapat bahwa unsur kelima bisa berupa perwakilan beragam komunitas atau kelompok penggerak inovasi, seperti pelaku usaha, aktivis, dan pihak yang berperan sebagai “perantara” atau jembatan antara pihak-pihak utama. Misalnya, organisasi non-pemerintah (NGO) atau kelompok masyarakat yang sering kali memahami langsung kebutuhan komunitas mereka. Pendekatan ini menekankan bahwa pihak-pihak yang biasanya tidak terlihat dalam pengambilan keputusan formal bisa ikut terlibat, sehingga bisa menciptakan kolaborasi yang lebih efektif dalam memadukan berbagai kepentingan. Meski ada pandangan berbeda tentang unsur kelima, banyak penelitian menempatkan media sebagai pilihan utama.

Media dianggap penting karena perannya dalam menyebarkan informasi dan mengarahkan opini masyarakat. Media dapat membangun citra positif atau negatif dari proyek inovasi tertentu tergantung pada bagaimana media melaporkannya. Media di sini tidak hanya merujuk pada media digital seperti portal berita online atau media sosial, tetapi juga media tradisional seperti surat kabar, radio, dan televisi. Semua jenis media ini dianggap sebagai aktor penting dalam Penta Helix karena mereka berfungsi sebagai jembatan antara inovasi dan masyarakat,

membantu memastikan bahwa masyarakat bisa mengetahui perkembangan yang ada dan turut memberikan dukungan.³²

Secara keseluruhan, Penta Helix dengan menambahkan unsur kelima memungkinkan model kolaborasi yang lebih luas dan inklusif. Model ini dianggap lebih mampu mengatasi tantangan kompleks dan mengakomodasi perubahan karena melibatkan lebih banyak aktor yang memiliki keahlian dan peran yang berbeda-beda dalam masyarakat. Dalam implementasi penta helix, masing-masing sektor memiliki peran yang spesifik, akademisi berfungsi sebagai konseptor yang mengidentifikasi potensi, kekurangan dan keterampilan, perusahaan sebagai pendukung yang menyediakan infrastruktur, masyarakat berperan sebagai akselerator atau sarana yang mempercepat adopsi dan penerimaan inovasi di tingkat komunitas, pemerintah bertugas untuk mendukung kebijakan dan regulasi, sementara media berperan dalam menyebarluaskan informasi dan membangun kesadaran masyarakat.³³

F. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat,

Penelitian ini berfokus pada kolaborasi empat pemangku kepentingan di

³² I Gede Eko Saputra et al., *Kolaborasi Dan Analisis Stake Holder: Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Malang: UB Press, 2024).

³³ Novy Setya Yunas, "Implementasi Konsep Penta Helix Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa Di Provinsi Jawa Timur," *Matra Pembaruan* 3, no. 1 (2019): 37–46.

Kabupaten Indramayu dalam mencegah kekerasan seksual pada anak, yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal) Polres Indramayu, Yayasan Slendang Puan Dharma Ayu, dan Dinas Sosial.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dalam bentuk lisan maupun tulisan mengenai tingkah laku dan aktivitas manusia.³⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki hubungan dengan kejadian yang ada di lapangan, dimana penelitian ini akan menampilkan efektivitas kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu dan pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan budaya di Kabupaten Indramayu terhadap kolaborasi para pemangku kepentingan dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dimana penulis mengeksplorasi sejauh mana kerjasama yang dilakukan antar lembaga berjalan efektif dalam konteks lokal, dan melihat konteks lokal sosial ekonomi dan budaya yang mempengaruhi cara pemangku kepentingan bekerja sama, dengan memahami dinamika lokal, termasuk norma-norma

³⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, 4th ed. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019).

sosial yang ada, serta tantangan ekonomi yang dihadapi, penulis melihat efektivitas mekanisme kolaborasi yang diterapkan.

3. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dikelompokkan dalam dua tipe yaitu data primer serta data sekunder:³⁵

a. Data primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data primer juga dikenal sebagai data asli atau data baru dengan karakteristik yang relevan pada saat ini. Untuk memperoleh data primer, peneliti perlu mengumpulkannya secara langsung dari sumber yang relevan. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diterima atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti memperoleh informasi tersebut melalui kegiatan membaca, melihat, dan mengamati. Data sekunder umumnya diambil dari informasi primer yang telah diolah sebelumnya oleh peneliti lain dari berbagai sumber, seperti buku, laporan, dan jurnal. Adapun buku dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini tentunya yang berkaitan dengan mekanisme pencegahan kekerasan seksual pada anak.

³⁵ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

4. Teknik Pengumpulan Informan

Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan pendekatan menemukan informan kunci dengan sengaja yang diyakini memiliki informasi yang relevan untuk mendapatkan data.³⁶ Penulis mencari enam informan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan sedang dan masih bekerja di instansi terkait
- b. Informan minimal memiliki pengalaman kerja selama satu tahun di instansi terkait
- c. Informan memiliki wawasan yang mendalam mengenai tema yang akan ditanyakan oleh penulis
- d. Informan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

Penelitian ini melibatkan enam informan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, Remaja Kenanga di bawah naungan Yayasan, dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

No	Nama Informan	Keterangan
1	Edi	Pekerja Sosial P2TP2A
2	Hendrik	Pekerja Sosial DINSOS
3	Slamet	Penyuluh sosial DINSOS
4	Darwinih	Founder dan Pembina YSPDA

³⁶ Fatah Abdul Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023).

5	Ririn	Remja kenanga YSPDA
6	IPDA Ragil Zaini Firdaus, S.H	Ketua Unit PPA

Tabel 1. Informan Penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebelum penulis melakukan tindakan pengumpulan data penulis meminta izin dan kesanggupan informan untuk menjadi subjek penelitian.

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada informan sebagai subjek penelitian yang berjumlah enam orang, pertanyaan untuk masing-masing informan merupakan pertanyaan yang kurang lebih sama. Dari masing-masing pemangku kepentingan P2TP2A, Sat Reskrim Polres Indramayu, Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, dan dinas sosial. Penulis mewawancarai informan dari setiap instansi dan mengajukan pertanyaan tentang peran dan fungsi masing-masing sektor, mekanisme kolaborasi, faktor pendukung dan penghambat, serta implikasi dari kolaborasi tersebut.

b. Observasi

Penulis melakukan observasi terhadap pemangku kepentingan dengan melihat keadaan dan situasi yang nyata di lapangan. Peneliti melihat bagaimana pemberian pelayanan berlangsung, pemberian edukasi kepada

masyarakat dan diskusi antara rekan kerja terkait penanganan kekerasan seksual pada anak.

c. Dokumentasi

Penulis akan mengabadikan momen di lapangan dengan informan melalui perekaman suara selama sesi wawancara berlangsung dan juga pemotretan. Namun hal tersebut dilakukan atas izin informan. Penulis mendapatkan foto berupa SOP yang berikan oleh informan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses di mana data diorganisir dan disusun menjadi pola, jenis, dan unit deskriptif dasar untuk menemukan topik dan mengembangkan hipotesis. Dalam konteks analisis data kualitatif, fokusnya adalah pada informasi yang terdiri dari kata-kata atau kalimat yang dihasilkan dari subjek tertentu dan terkait dengan peristiwa yang melibatkan subjek tersebut.³⁷ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif koding. Induktif koding merupakan proses di mana peneliti langsung melihat data wawancara dan mengkodekannya melalui tahapan berikut:

a. Reduksi Data:

Pada tahap ini, data direduksi dengan melakukan rangkuman, pemilahan aspek-aspek yang pokok, fokus pada hal-hal yang relevan, mencari tema dan pola, serta menghapus informasi yang tidak relevan.

³⁷ Nur Hikmatul Auliya Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 5, 2020.

Reduksi data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik abstraksi, yaitu menghasilkan rangkuman yang mengandung inti, proses, dan pernyataan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tujuan dari tahap reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama pengumpulan data di lapangan. Pada fase ini penulis akan memilih yang penting dan tidak penting dari data yang di dapat, memisahkan antara jawaban yang relefan sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang diluar pertanyaan.

b. Presentasi Data:

Pada tahap ini, data disajikan dan direpresentasikan dengan upaya menampilkan gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data. Peneliti akan melakukan pengkodean pada setiap sub-pertanyaan dan berusaha mengklasifikasikan serta menyajikan informasi sesuai dengan kasus utama. Setelah fase reduksi penulis tiba di fase presentasi data, dimana data dari hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi dan intervensi akan penulis kelompokkan sesuai dengan temanya masing-masing.

c. Penyelesaian atau Review:

Tahap penyelesaian atau review data dalam penelitian ini dilakukan setelah proses reduksi dan penyajian data. Dalam konteks penelitian ini, *review data* dilakukan dengan cara membandingkan keterangan antar informan dari lembaga yang berbeda, misalnya antara pekerja sosial Dinas Sosial, pihak P2TP2A, Unit PPA, dan Yayasan Selendang Puan Dharma

Ayu. Proses *review* ini penting untuk memastikan konsistensi informasi mengenai mekanisme kolaborasi. Sebagai contoh, ketika pihak UPPA menyebutkan bahwa mereka lebih banyak berkoordinasi dengan Dinas Sosial, peneliti meninjau ulang informasi tersebut dengan data hasil wawancara Dinas Sosial serta dokumen pendukung yang menunjukkan bentuk kerjasama yang telah dilakukan. Hasil dari tahap *review data* inilah yang kemudian digunakan peneliti untuk menarik kesimpulan, terutama dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai mekanisme kolaborasi, faktor pendukung dan penghambat, serta implikasi kolaborasi terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu.

7. Teknik Uji Kualitas Data

Untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat dan memastikan kebenaran serta kelengkapan data. Triangulasi dapat dilakukan secara berkelanjutan, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jawaban dari pertanyaan wawancara akan dikonfirmasi ulang kepada informan sampai peneliti merasa puas dan cukup dengan data yang telah diperoleh.³⁸ Penulis melakukan pengecekan ulang setiap pertanyaan yang dilontarkan kepada informan, penulis juga memperjelas maksud yang terkandung dalam jawaban tersebut apakah sudah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh informan.

³⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*.

Dengan melakukan pengecekan tersebut penulis harap data yang diperoleh akan valid dan kuat untuk dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini. Uji kredibilitas dilakukan melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data hasil wawancara dari berbagai informan seperti P2TP2A, Dinas Sosial, Unit PPA, dan YSPDA. Selain itu, peneliti juga menyesuaikan data hasil wawancara dengan dokumentasi seperti peraturan daerah dan laporan program. Misalnya, keterangan dari UPPA yang menyebutkan lebih sering berkoordinasi dengan Dinas Sosial ditinjau kembali dengan informasi dari pekerja sosial Dinas Sosial serta dokumen pendukung.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I berisi tentang pendahuluan, diantaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, dan kajian pustaka, kajian teoretis, dan metode penelitian.

BAB II memaparkan kekerasan seksual pada anak di Indramayu yang berisi tentang demografi Kabupaten Indramayu, pemahaman masyarakat Indramayu tentang kekerasan seksual pada anak, profil sektor, serta alur pelayanan dan fungsi sektor.

BAB III menguraikan tentang memahami peran dan fungsi pemangku kepentingan melalui koordinasi dan potensi serta tantangannya.

BAB IV berisi implikasi yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, layanan yang lebih responsive serta analisis penta helix.

BAB V penutup yaitu kesimpulan secara keseluruhan dan memberikan saran atau rekomendasi yang mengarah kepada hal yang lebih bai



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu telah berjalan secara kolaboratif dan terpadu melalui sistem jejaring yang melibatkan Dinas Sosial, P2TP2A, UPPA Polres, dan YSPDA. Koordinasi ini mencakup rujukan kasus, pendampingan psikologis dan hukum, serta edukasi kepada masyarakat.

Potensi utama dari kolaborasi ini terletak pada komitmen tinggi antar lembaga, terbentuknya jejaring yang kuat hingga tingkat desa, kepercayaan antar sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaporan kasus. Namun demikian, tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya kapasitas SDM dari para pemangku kepentingan, adanya kuasa yang dimiliki oleh beberapa sektor dan tidak berpihaknya pemerintah kepada LSM menjadi sebuah batu loncatan yang perlu lebih diperhatikan.

Dalam implikasinya kolaborasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan berjalan efektif dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mempercepat penanganan kasus, serta memperkuat perlindungan anak. Namun, untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan dan preventif, dibutuhkan kebijakan yang lebih responsif, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan sistem layanan di tingkat akar rumput.

B. SARAN

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, terdapat tiga saran utama yang dapat dijadikan acuan, yaitu untuk penelitian selanjutnya, praktik pekerja sosial, dan kebijakan sosial.

1. Penelitian Selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada keterlibatan sektor akademisi dan media yang belum banyak disentuh dalam penelitian ini, mengingat peran dua sektor tersebut sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Indramayu.

2. Praktik Pekerja Sosial

- a. Diperlukan peningkatan kapasitas pekerja sosial agar memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap perspektif gender dalam menjalankan tugasnya.
- b. Mengingat peran pekerja sosial sebagai fasilitator kolaborasi antar lembaga, maka penerapan praktik pekerja sosial dalam kerangka penta helix menjadi sangat penting. Pekerja sosial diharapkan mampu menjadi penghubung antar sektor secara efektif.
- c. Selain itu, pekerja sosial juga perlu memperkuat peran sebagai advokat, terutama dalam memperjuangkan hak-hak korban dan mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.

3. Kebijakan Sosial

- a. Pemerintah daerah perlu menambah jumlah dan meningkatkan kualitas sumber daya pekerja sosial di Kabupaten Indramayu agar layanan perlindungan anak lebih optimal.
- b. Kebijakan terkait mekanisme koordinasi antar lembaga perlu disusun dengan jalur yang lebih jelas dan terstruktur, sehingga proses penanganan kasus dapat dilakukan secara terpadu dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan*

Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. 4th ed. Depok: PT.

Rajagrafindo Persada, 2019.

Andayani, Rifka Putri, Ridhyalla Afnuhazi, Santi Dafris, Putri Rahmatul Huda,

Yulmaini Hendra Dewi Ningsih, Bagus Irwanda, Citra Wirda Dwi Edo,

Defrima Oka Surya, Guslinda Guslinda, and Vivi Syofia Sapardi.

“Implementasi Personal Safety Skill Untuk Mencegah Kekerasan Seksual

Pada Anak Sekolah Dasar.” *Jurnal Abdi Mercusuar* 2, no. 2 (2022): 51–58.

<https://doi.org/10.36984/jam.v2i2.324>.

Ardiansyah, Randi, Berti Mandala Putra, and Widia Widia. “Kondisi Sosial

Ekonomi Dan Pendidikan Anak Pada Rumah Tangga Tenaga Kerja Wanita

(TKW).” *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 11 (2022): 5134–42.

<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1160>.

BPS. “Garis Kemiskinan Menurut Kab/Kota (Rupiah/Perkapita/Perbulan)

(Rupiah/Perkapita/Perbulan), 2024,” n.d.

<https://indramayukab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTY3IzI=/garis-kemiskinan-menurut-kab-kota-rupiah-perkapita-perbulan-.html>.

———. “Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota (Persen), 2024,” n.d.

<https://indramayukab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTczIzI%3D/persentase-penduduk-miskin-menurut-kab-kota.html>.

Brillianto, H. I., S. Suwitri, and T. Afrizal. “Analisis Kolaborasi Stakeholder

Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Semarang.” *Journal of Public Policy*, 2024, 1–19.

Etzkowitz, Henry. *The Triple Helix. The Triple Helix*, 2008.

<https://doi.org/10.4324/9780203929605>.

Febriagivary, Agida Hafsyah. “Mengenalkan Pendidikan Seksualitas Untuk Anak Usia Dini Melalui Metode Bernyanyi.” *Children Advisory Research and Education Jurnal CARE* 8, no. 2 (2021): 2021. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JPAUD>.

Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, Nur Hikmatul Auliya. *Buku Metode Penelitian Kualitatif. Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5, 2020.

Indramayu, Diskominfo Kabupaten. “Reang Beberes Dermayu,” 2025.

Jaman, Ujang Badru, and Agung Zulfikri. “Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Hukum Dan HAM West Science* 1, no. 1 (2022): 1–7. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/4%0Ahttps://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/download/4/4>.

Joni, I Dewa Ayu Maythalia, and Endang R. Surjaningrum. “Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru Dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Diversita* 6, no. 1 (2020): 20–27.

<https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3582>.

Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

KPAI R.N. Data Perlindungan Anak 2024 (2025).

Margaretta, Sheylla Septina, and Putri Kristyaningsih. “The Effectiveness of Sexual Education on Sexuality Knowledge and How To Prevent Sexual Violence in School Age Children.” *JIKBW Press*, 2020, 57–61.

Maulana, Dimas Irfan, and Is Fadhilah. “Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Di Wilayah Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)” 1192, no. 09 (2024): 304–17.

Mulyati, Sri, Azzahra Dinda Rahmadina, Rinda Siaga Pangestuti, Prodi Manajemen, and Universitas Islam. “Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Perempuan, Anak, Dan Remaja Di Kelurahan Pulogebang Dan Desa Telajung.” *Community Engagement & Emergence Journal* 3, no. 1 (2022): 67–77.

Nasution, Fatah Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Nurchahyati, Erika Vivian, and Martinus Legowo. “Peran Keluarga Dalam

Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utama Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2022): 22.

<https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1.4735>.

Nurhidayah, Ikeu, and Neng Lani Ligina. “The Role of Parents in Preventing Sexual Violence on Elementary School Children in Bandung.” *Jurnal Keperawatan* 9, no. 2 (2018): 109. <https://doi.org/10.22219/jk.v9i2.5454>.

Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (2021): 56–60. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>.

Pangestuti, Dian, Okto Wijayanti, and Santhy Hawanti. “Persepsi Guru Tentang Pendidikan Seks Di SD Negeri 2 Sudagaran.” *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021): 39–44.

Pasaribu, Lina Putri, Nurliana Cipta Apsari, and Sri Sulastrri. “Kolaborasi Penta Helix Dalam Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi.” *Share : Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 140. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.47909>.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Tesis*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2021.

“Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012, Tentang Pencegahan, Perlindungan Dan Pemulihan Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Di Kabupaten Indramayu,” n.d.

Rahmawati, C. Pagitha, and Diana Hertati. “Collaborative Governance Dalam

Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya.” *Jurnal*

Noken: Ilmu-Ilmu Sosial 9, no. 1 (2023): 1–10.

<https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444>.

Rusyidi, Binahayati. “Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kekerasan

Terhadap Perempuan Dan Anak.” *Sosio Informa* 4, no. 1 (2018): 375–87.

<https://doi.org/10.33007/inf.v4i1.1416>.

Sanggar, D I, and Mindulahin Jambi. “UPAYA EDUKASI LITERASI DIGITAL

MELALUI MEDIA ONLINE DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN

SEKSUAL PADA ANAK-ANAK” 5, no. 5 (2024): 9279–84.

Saputra, I Gede Eko, Sri Sentanu, Yuniawati Anti Tirani, and Gadang Ali Syariati

Pradono. *Kolaborasi Dan Analisis Stake Holder: Teori, Konsep, Dan*

Aplikasi. Malang: UB Press, 2024.

Satria S Pamungkas. “11,93 Persen Penduduk Indramayu Masuk Kategori Miskin,

Tertinggi Se-Jawa Barat.” *PanturaPost.com*, 2024.

[https://www.panturapost.com/daerah/2075151277/1193-persen-penduduk-](https://www.panturapost.com/daerah/2075151277/1193-persen-penduduk-indramayu-masuk-kategori-miskin-tertinggi-se-jawa-barat?utm_source=chatgpt.com)

[indramayu-masuk-kategori-miskin-tertinggi-se-jawa-](https://www.panturapost.com/daerah/2075151277/1193-persen-penduduk-indramayu-masuk-kategori-miskin-tertinggi-se-jawa-barat?utm_source=chatgpt.com)

[barat?utm_source=chatgpt.com](https://www.panturapost.com/daerah/2075151277/1193-persen-penduduk-indramayu-masuk-kategori-miskin-tertinggi-se-jawa-barat?utm_source=chatgpt.com).

Setya Yunas, Novy. “Implementasi Konsep Penta Helix Dalam Pengembangan

Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa Di Provinsi Jawa

Timur.” *Matra Pembaruan* 3, no. 1 (2019): 37–46.

<https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>.

Siburian, Maurice, and Arozatulo Maendrofa. “Peranan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak.” *Jurnal Rectum* 3, no. 1 (2021): 100–106.

Siswanto, Yayan Agus, Fajar Rachmad Dwi Fajar Miarsa, and Sudjiono. “Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–67.
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>.

Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Solehati, Tetti, Riezky Fajri Septiani, Rizka Muliani, Selly Amalia Nurhasanah, Sifa Nur Afriani, Sifa Nuraini, Sifva Fauziah, et al. “Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review.” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022): 2201–14. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>.

Sommaliagustina, Desi, and Dian Cita Sari. “PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi) KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA” 1, no. 2 (2018): 76–85.
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan/>.

Sulaeman, Dicky Andika, Santi Junianti, Kelvin Baskara, Diana Eka Novita, and Wiryono. “EDUKASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH DASAR.” In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Tahun 2023 LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon*, 524–33, 2023.

Sumarta, Sumarta, and Abas Abdul Jalil. "Analisis Sosial Ekonomi Pembangunan Masyarakat Indramayu." *Khulasah : Islamic Studies Journal* 4, no. 2 (2023): 31–44. <https://doi.org/10.55656/kisj.v4i2.75>.

Swandhono, May Agus, Nur Azizah, Miftahul Huda, and Nur Rohmat Nuzil.

Sinergi Pentahelix Pendekatan Kolaboratif Untuk PengembanganTechnosociopreneurship, 2025.

[https://repository.yudharta.ac.id/id/eprint/5917%0Ahttps://repository.yudharta.ac.id/5917/1/E-Book Bu Zizah.pdf](https://repository.yudharta.ac.id/id/eprint/5917%0Ahttps://repository.yudharta.ac.id/5917/1/E-Book%20Bu%20Zizah.pdf).

Ummah, Ulfa Khoirothul, and Heri Kurnia. "Agama Sebagai Benteng Untuk Mencegah Kasus Kekerasan Seksual Anak Sejak Dini." *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 1, no. 2 (2021): 83–90. <https://doi.org/10.47200/aossagej.v1i2.1855>.

Zulfan Fikriansyah, and Aan Julia. "Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus : Di Desa Bongas Kecamatan Bogas Kabupaten Indramayu)." *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 25–32. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1889>.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA